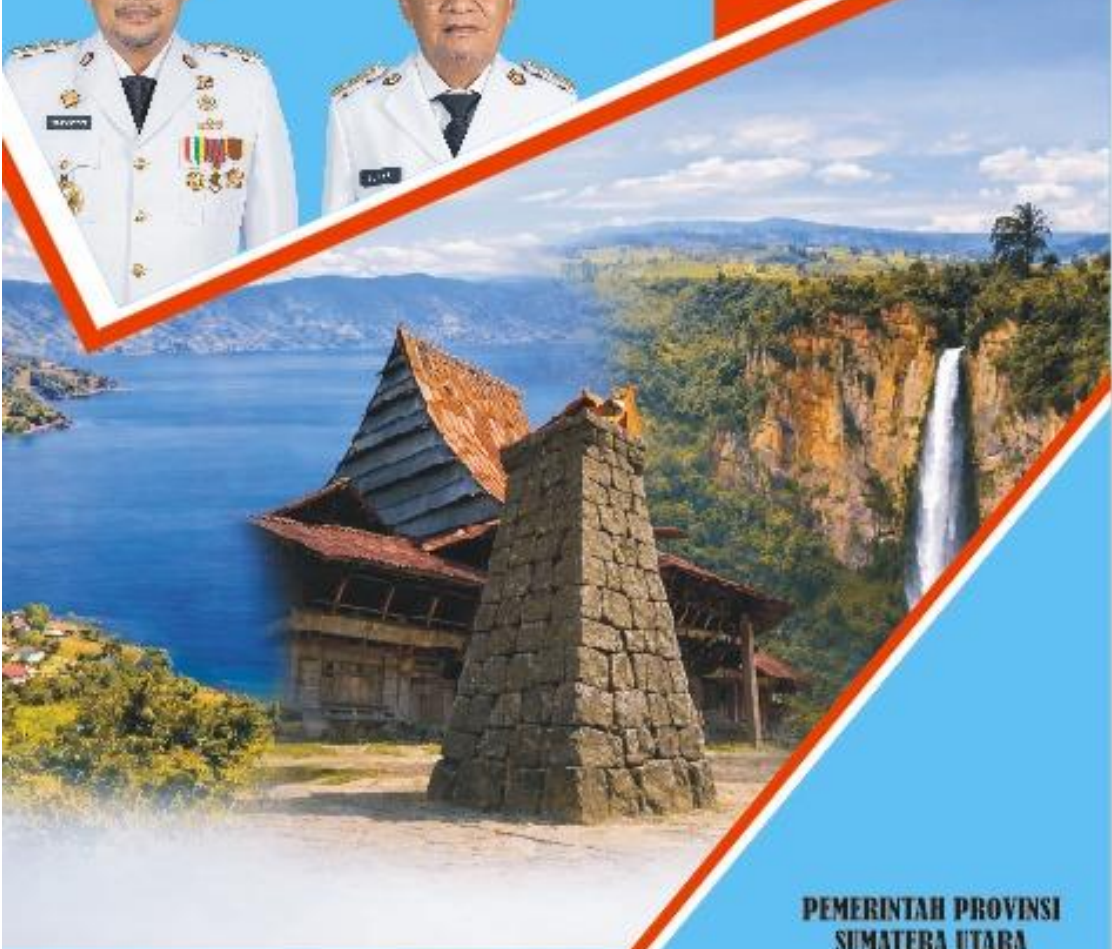


**RINGKASAN LPPD
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin, dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

RLPPD merupakan dokumen wajib yang disusun berdasarkan amanat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dokumen ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024, yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat.


RLPPD ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai *capaian* kinerja pembangunan, realisasi anggaran, pelaksanaan tugas pembantuan, serta penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama tahun anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, masih terdapat berbagai tantangan. Oleh karena itu, RLPPD ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan yang konstruktif dari pemerintah pusat, jajaran DPRD, stakeholder, dan seluruh masyarakat Sumatera Utara guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, dan masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Semoga RLPPD ini memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi pijakan bagi terwujudnya Sumatera Utara yang lebih maju, aman, dan bermartabat.

Demikian RLPPD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 ini kami sampaikan untuk dapat memberikan informasi yang komprehensif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025.

GUBERNUR SUMATERA UTARA



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

DAFTAR ISI

	hal	
Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	iii	
BAB I	CAPAIAN KINERJA MAKRO	1
	A. Kemiskinan dan Ketimpangan	2
	B. Ketenagakerjaan	4
	C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	7
	1. Indeks Kesehatan	10
	2. Indeks Pendidikan	10
	3. Indeks Standar Hidup Layak	11
	D. Pertumbuhan Ekonomi	14
	E. Inflasi	26
	F. Perdagangan Luar Negeri	28
BAB II	RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR	30
	1. Urusan Pendidikan	30
	A. Capaian Kinerja	30
	B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan	32
	C. Permasalahan yang dihadapi	32
	2. Urusan Kesehatan	33
	A. Capaian Kinerja	33
	B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan	35
	C. Permasalahan yang dihadapi	35
	3. Urusan Pekerjaan Umum	37
	A. Capaian Kinerja	37
	B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum	40
	C. Permasalahan yang dihadapi	40
	4. Urusan Perumahan	41
	A. Capaian Kinerja	42
	B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan	42
	C. Permasalahan yang dihadapi	42
	5. Urusan Trantibum Linmas	43
	A. Capaian Kinerja	43

B. Realisasi Belanja Urusan Trantibum Linmas	45
C. Permasalahan yang dihadapi	46
6. Urusan Sosial	46
A. Capaian Kinerja	46
B. Realisasi Belanja Urusan Sosial	49
C. Permasalahan yang dihadapi	49
BAB III HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	51
A. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	51
B. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	52
BAB IV RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH	54
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah	54
B. Pengelolaan Belanja Daerah	56
C. Pembiayaan Daerah	58
BAB V INOVASI DAERAH	61
BAB VI PENUTUP	80

BAB I

CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 tercermin melalui perkembangan indikator makro sosial ekonomi daerah. Indikator-indikator tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja pembangunan daerah yang dicapai selama tahun 2025, baik dari aspek kesejahteraan masyarakat maupun stabilitas perekonomian daerah. Indikator makro yang disajikan dalam bab ini meliputi persentase dan jumlah penduduk miskin, ketimpangan pendapatan, kondisi angkatan kerja dan tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta kinerja perdagangan luar negeri yang ditunjukkan melalui ekspor dan impor.

Berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan kontribusi terhadap perbaikan kinerja pembangunan daerah. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Sumatera Utara pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari perkembangan sejumlah indikator makro pembangunan daerah yang menggambarkan peningkatan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan capaian indikator makro Provinsi Sumatera Utara tahun 2024–2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Perkembangan Capaian Kinerja Makro Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2024 – 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		Laju Kinerja
		2024	2025	
1.	Penduduk Miskin kondisi Maret			
	a. Jumlah (ribu jiwa)	1.228,01	1.140,25	-7,15%
	b. Persentase (%)	7,99	7,36	-0,63% poin
2.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Maret	0,297	0,295	-0,002 poin
3.	Ketenagakerjaan (Agustus)			
	a. Angkatan Kerja (ribu jiwa)	8.181	8.425	2,98%
	b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,36	72,29	0,93% poin
	c. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,60	5,32	-0,28% poin
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,76	76,47	0,71 poin
5.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	4,53	-0,50% poin
6.	Pendapatan Per Kapita (juta rupiah)			
	a. Atas Dasar Harga Berlaku	73,57	78,31	6,44%
	b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	40,58	41,89	3,23%
7.	Inflasi (%)	2,12	4,66	2,54% poin
8.	Perdagangan Luar Negeri (ribu US\$)			
	a. Ekspor	10.799.901	12.396.413	14,78%
	b. Impor	5.795.160	5.467.904	-5,65%
	c. Neraca Perdagangan	5.004.741	6.928.510	38,44%

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

1. Kemiskinan dan Ketimpangan

Berbagai Program Pengentasan Kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini telah berdampak positif pada penurunan kemiskinan di Sumatera Utara. Hasil Susenas bulan Maret 2025

menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,63% poin yaitu dari 7,99 persen pada Maret 2024 menjadi 7,36 persen pada Maret 2025. Angka kemiskinan ini setara dengan 1.140.250 jiwa pada Maret 2025, atau berkurang sekitar 87.760 jiwa.

Sedangkan kondisi bulan September 2025 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.128,06 ribu jiwa atau sebesar 7,24 persen terhadap total penduduk Provinsi Sumatera Utara. Jumlah penduduk miskin tersebut menurun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2024 yang mencatatkan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.228,01 ribu jiwa atau sebesar 7,99 persen. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 12.190 jiwa pada periode Maret 2024 - September 2025, dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 1,07 poin.

Tabel 1.2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Utara Tahun 2024-2025

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Maret 2024	697,46	530,55	1.228,01	7,93	8,08	7,99
2. September 2024	623,78	487,14	1.110,92	7,01	7,44	7,19
3. Maret 2025	636,55	503,71	1.140,25	7,10	7,71	7,36
4. September 2025	648,75	479,31	1.128,06	7,16	7,35	7,24

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara - Survey Sosial Ekonomi Nasional 2024 - 2025

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Pada Maret 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Utara yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,295. Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,297. Pada September 2025, nilai Gini Ratio turun menjadi 0,283. Secara umum nilai Gini Ratio Sumatera Utara mengalami fluktuasi pada periode tahun 2024-2025.

Tabel 1.3
Gini Ratio Sumatera Utara Tahun 2024-2025

Tahun	Gini Ratio		
	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Maret 2024	0,325	0,230	0,297
2. September 2024	0,333	0,236	0,306
3. Maret 2025	0,324	0,228	0,295
4. September 2025	0,305	0,233	0,283
5. September 2022	0,325	0,230	0,297

Sumber : BPS-Survey Sosial Ekonomi Nasional 2024 – 2025

2. Ketenagakerjaan

Jumlah Angkatan Kerja Sumatera Utara pada Agustus 2025 sebanyak 8.425.000 orang, naik 244.000 orang dibanding Agustus 2024. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 sebanyak 7.723.000 orang, sedangkan yang menganggur 458.000 orang. Dibanding tahun

2024, jumlah penduduk bekerja tahun 2025 bertambah 253.000 orang (3,20%) menjadi 7.976.000 orang, sedangkan jumlah pengangguran turun 1.000 orang (2,23%) menjadi 448.000 orang.

Tabel 1.4
Kondisi Ketenagakerjaan di Sumatera Utara Agustus 2023 - Agustus 2025

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Satuan	Agustus 2023	Agustus 2024	Agustus 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penduduk Usia Kerja	Ribu Orang	11.289	11.464	11.653
2. Angkatan Kerja	Ribu Orang	8.022	8.181	8.425
a. Bekerja	Ribu Orang	7.550	7.723	7.976
b. Pengangguran	Ribu Orang	472	458	448
3. Bukan Angkatan Kerja	Ribu Orang	3.267	3.283	3.229
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	71,06	71,36	72,29
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,89	5,60	5,32

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2023- 2025

Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mempunyai pola yang sama. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Agustus 2025 tercatat sebesar 72,29%, naik 0,93 poin dibanding setahun yang lalu yang sebesar 71,36%. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya peningkatan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga

kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2025 sebesar 5,32%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang penganggur. Pada Agustus 2025, TPT mengalami penurunan sebesar 0,28 poin dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 5,60%.

Tabel 1.5
Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut
Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2024 - 2025

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	Agustus 2024		Agustus 2025	
		Jumlah (000)	Persen	Jumlah (000)	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.562	33,18	2.595	32,53
2	B. Pertambangan dan Penggalian	47	0,60	39	0,49
3	C. Industri Pengolahan	706	9,14	721	9,04
4	D. Pengadaan Listrik dan Gas	22	0,29	24	0,30
5	E. Pengadaan Air	35	0,45	41	0,51
6	F. Konstruksi	468	6,06	480	6,02
7	G. Perdagangan Besar dan Eceran	1.533	19,85	1.586	19,89
8	H. Transportasi dan Pergudangan	335	4,33	360	4,51
9	I. Akomodasi dan Makan Minum	645	8,35	666	8,35
10	J. Informasi dan Komunikasi	45	0,58	47	0,59
11	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	67	0,86	64	0,81
12	L. Real Estat	10	0,12	14	0,17
13	M, N. Jasa Perusahaan	130	1,68	123	1,55
14	O. Administrasi Pemerintahan	262	3,40	277	3,48
15	P. Jasa Pendidikan	386	4,99	422	5,92
16	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	131	1,70	133	1,67
17	R,S,T,U. Jasa Lainnya	340	4,40	382	4,79
JUMLAH		7.723	100,00	7.976	100,00

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024-2025

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja, tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor perekonomian yang ada. Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2025, penduduk Sumatera Utara paling banyak bekerja pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebanyak 2.595.000 orang (32,53%), disusul oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; dan Industri Pengolahan masing-masing sebanyak 1.586.000 orang (19,89%) dan 721.000 orang (9,04%).

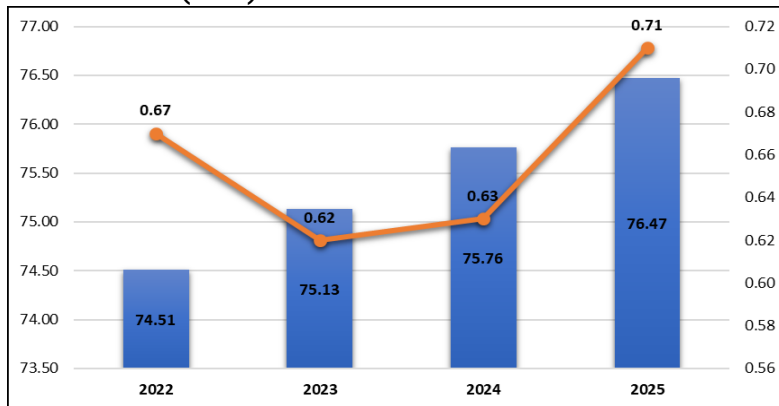
Jika dilihat berdasarkan persentase perubahan lapangan pekerjaan selama Agustus 2024-Agustus 2025, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja terbesar ada pada sektor Jasa Pendidikan (0,30 poin).

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

IPM dapat menjelaskan bagaimana pemerataan dalam akses memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Untuk mendapatkan nilai IPM diperlukan data pendukung diantaranya data umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Ketiga data pendukung ini dapat dijelaskan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), serta nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). Ketiga komponen tersebut kemudian dihitung rata-ratanya sehingga menghasilkan indeks yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Gambar 1.1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) Sumatera Utara 2022-2025



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : Komponen UHH berdasarkan hasil SP2020

IPM Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Gambar diatas menjelaskan secara umum, pembangunan manusia Sumatera Utara terus mengalami kemajuan selama periode 2022 hingga 2025. IPM Sumatera Utara pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Sumatera Utara 2025 sebesar 76,47 atau tumbuh 0,94 persen (meningkat 0,71 poin) dibandingkan capaian IPM 2024 yang sebesar 75,76. Pertumbuhan ini meningkat jika dibanding pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 0,84 persen.

Tabel 1.6
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara Menurut
Komponen Tahun 2022-2025

Komponen	Satuan	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(2)	(4)	(4)	(5)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	73,39	73,67	73,90	74,19
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,31	13,48	13,49	13,50
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,71	9,82	9,93	10,08
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Ribu Rupiah	10.848	11.049	11.460	11.898
IPM		74,51	75,13	75,76	76,47

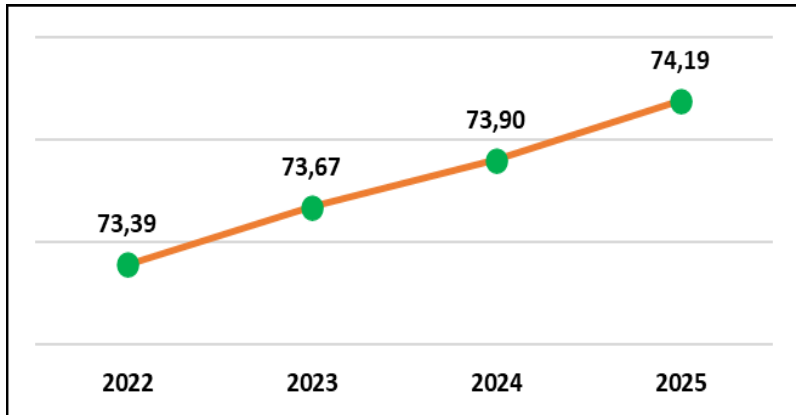
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : Komponen UHH berdasarkan hasil SP2020

1. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan dapat dilihat dari variable/indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), indeks ini terus mengalami peningkatan selama periode 2022 hingga 2025. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berhasil meningkatkan UHH sebesar 0,29 tahun pada periode tahun 2024-2025. Pada tahun 2022, UHH di Sumatera Utara adalah 73,39 tahun, meningkat menjadi 73,67 tahun pada tahun 2023, meningkat kembali menjadi 73,90 tahun pada 2024, dan pada tahun 2025 mencapai 74,19 tahun.

Gambar 1.2
Perkembangan Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
Sumatera Utara 2022-2025



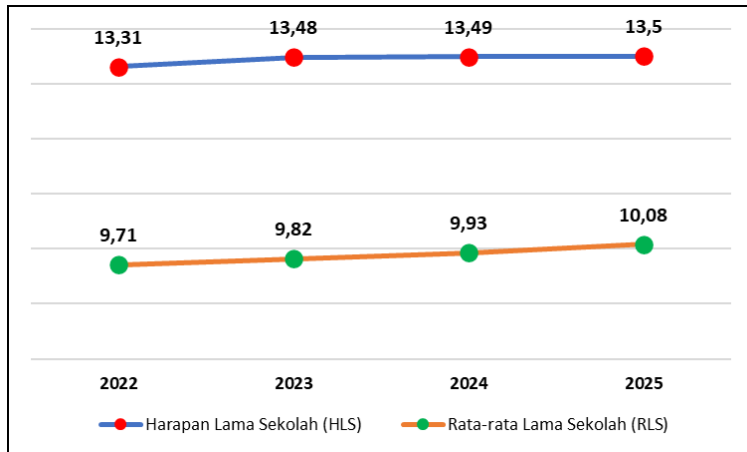
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

2. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke

atas. Selama periode 2022 hingga 2025, HLS dan RLS di Sumatera Utara mengalami peningkatan.

Gambar 1.3
Perkembangan Indeks Pendidikan Sumatera Utara 2022-2025

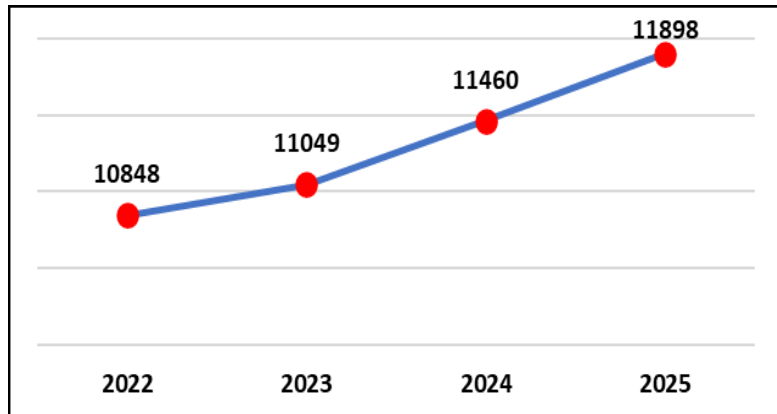


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

3. Indeks Standar Hidup Layak

Indeks Standar Hidup diukur melalui indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang dapat menjelaskan kualitas hidup manusia. Pengeluaran per kapita masyarakat Sumatera Utara tahun 2024 mencapai Rp11.460.000 per tahun dan meningkat sebesar 3,68% pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp11.898.000 per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah era pasca covid melanda Indonesia, pengeluaran per kapita mulai meningkat kembali setelah di 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Gambar 1.4
Perkembangan Pengeluaran Perkapita Per Tahun Sumatera Utara
2022-2025 (Rp 000)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Seiring dengan meningkatnya IPM Sumatera Utara, seluruh kabupaten/ kota mengalami peningkatan IPM. Dari sisi perbandingan antar kabupaten/ kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing provinsi. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Nias Barat (66,65), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Medan (83,74) disusul oleh Pematang Siantar (81,71) dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$).

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki status IPM “rendah” ($IPM < 60$) sudah tidak ada sejak 2018. Jumlah kabupaten/kota dengan status capaian IPM “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$) pada tahun 2025 menjadi 2 kabupaten/kota. Jumlah kabupaten/kota dengan status capaian IPM “tinggi”

($70 \leq \text{IPM} < 80$) pada tahun 2025 menjadi 27 kabupaten/kota. Sedangkan IPM dengan status “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$) sebanyak 4 kabupaten/kota.

Tabel 1.7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota
Sumatera Utara 2022– 2025

No.	KABUPATEN/KOTA	2022	2023	2024	2025
1	Nias	64,30	65,15	66,13	66,79
2	Mandailing Natal	72,17	72,65	73,44	74,26
3	Tapanuli Selatan	73,96	74,58	75,18	75,78
4	Tapanuli Tengah	72,18	72,77	73,34	73,97
5	Tapanuli Utara	76,43	76,86	77,48	78,09
6	Toba	77,58	77,83	78,44	79,17
7	Labuhanbatu	73,96	74,70	75,20	75,79
8	Asahan	73,18	73,59	74,17	75,13
9	Simalungun	74,68	75,17	75,88	76,48
10	Dairi	74,60	75,18	75,88	76,68
11	Karo	76,37	76,88	77,49	78,10
12	Deli Serdang	76,86	77,16	77,56	78,29
13	Langkat	74,03	74,33	74,85	75,58
14	Nias Selatan	64,05	64,98	65,87	66,74
15	Humbang Hasundutan	72,05	72,49	73,33	73,93
16	Pakpak Bharat	71,57	72,30	73,09	73,89
17	Samosir	72,57	72,93	73,77	74,63
18	Serdang Bedagai	72,89	73,40	74,15	74,69
19	Batu Bara	71,75	72,56	73,14	73,92
20	Padang Lawas Utara	72,77	73,45	74,16	75,12
21	Padang Lawas	71,41	72,16	73,10	73,90
22	Labuhanbatu Selatan	73,59	74,23	75,11	75,74
23	Labuhanbatu Utara	74,61	75,45	76,20	76,71
24	Nias Utara	64,55	65,44	66,42	67,38
25	Nias Barat	63,96	64,68	65,66	66,65
26	Sibolga	76,69	77,07	77,52	78,11
27	Tanjungbalai	74,73	75,42	75,95	76,70
28	Pematang Siantar	79,71	80,46	81,17	81,71
29	Tebing Tinggi	77,39	78,17	78,68	79,26

No.	KABUPATEN/KOTA	2022	2023	2024	2025
30	Medan	82,13	82,61	83,23	83,74
31	Binjai	77,50	78,11	78,67	79,20
32	Padang Sidempuan	77,73	78,10	78,61	79,19
33	Gunungsitoli	71,11	71,55	72,30	73,29
Sumatera Utara		74,51	75,13	75,76	76,47

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/kota di Sumatera Utara yang memiliki laju pertumbuhan IPM paling tinggi selama 2024-2025 adalah Kabupaten Nias Barat yang mencapai 1,51%. Sementara itu, kemajuan pembangunan manusia di Kota Medan yang sebesar 0,61% tercatat sebagai yang paling lambat.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sumatera Utara tahun 2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.1.236,19 triliun dengan pendapatan per kapita sebesar Rp.72,65 juta. Secara makro, kinerja perekonomian Sumatera Utara tahun 2025 yang diukur berdasarkan atas perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 4,53%, angka ini mengalami perlambatan dibanding capaian tahun 2024 yang sebesar 5,03%.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,74%, sedangkan dari sisi pengeluaran,

pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yaitu sebesar 10,24 %.

Tabel 1.8
PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2024-2025 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha/Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2024 ^{*)}	2025 ^{**)}	2024 ^{*)}	2025 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	279.732,30	313.000,70	158.940,63	166.702,95
B. Pertambangan & Penggalian	13.308,37	14.582,05	7.812,28	7.945,15
C. Industri Pengolahan	210.618,69	227.374,41	108.101,46	111.869,00
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	1.125,19	1.169,70	867,32	895,99
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	1.001,63	1.091,71	598,49	635,36
F. Konstruksi	149.061,01	149.718,65	79.752,79	79.734,18
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	215.708,94	234.500,12	116.065,40	123.197,78
H. Transportasi dan Pergudangan	57.640,22	64.018,36	29.453,12	32.616,04
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25.335,31	27.043,07	15.741,20	16.429,69
J. Informasi dan Komunikasi	26.124,96	28.018,56	21.661,70	23.074,36
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	31.626,43	33.061,89	18.222,68	18.787,78
L. Real Estate	52.204,45	54.994,54	26.977,20	29.308,68
M,N. Jasa Perusahaan	12,010,07	13.529,23	5.747,52	6.347,86
O. Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	34.463,70	34.468,27	19.506,72	19.390,42
P. Jasa Pendidikan	19.784,20	20.973,65	13.634,23	14.201,83
Q. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	10.668,57	11.909,46	5.972,61	6.470,75
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6.505,72	6.739,20	3.479,39	3.596,36
PDRB	1.146.919,75	1.236.193,57	632.534,73	661.204,18

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat sementara

Pada tahun 2025 PDRB Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga berlaku mencapai Rp1.236,19 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 tercapai sebesar Rp661,20 triliun. Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, yang menghasilkan nilai tambah bruto terbesar pada tahun 2025 adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp.313 triliun (25,32%), diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp.234,50 triliun (18,97%), lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar Rp.227,37 triliun (18,39%), lapangan usaha Konstruksi Rp.149,72 triliun (12,11%) dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan Rp.64,02 triliun (5,18%). Sedangkan 12 lapangan usaha lainnya hanya mampu menghasilkan nilai tambah bruto masing-masing dibawah 5% dari nilai total PDRB Sumatera Utara.

Tabel 1.9
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2025 (persen)

Lapangan Usaha/ Kategori	Distribusi PDRB			
	2022	2023	2024^{*)}	2025^{**)}
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,98	23,59	24,44	25,32
B. Pertambangan & Penggalian	1,21	1,17	1,16	1,18
C. Industri Pengolahan	19,13	18,43	18,36	18,39
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	0,11	0,10	0,10	0,09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09
F. Konstruksi	13,23	13,20	12,99	12,11
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,99	19,08	18,79	18,97
H. Transportasi dan Pergudangan	4,54	5,05	5,01	5,18
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,04	2,11	2,21	2,19
J. Informasi dan Komunikasi	2,33	2,30	2,28	2,27

Lapangan Usaha/ Kategori	Distribusi PDRB			
	2022	2023	2024 ^{*)}	2025 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,97	2,88	2,76	2,67
L. Real Estate	4,88	4,66	4,55	4,45
M,N. Jasa Perusahaan	1,05	1,06	1,04	1,09
R. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,17	3,00	3,00	2,79
S. Jasa Pendidikan	1,77	1,75	1,72	1,70
T. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	0,95	0,94	0,93	0,96
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,55	0,58	0,57	0,55
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat sementara

Jika diamati angka pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,74%, diikuti oleh Jasa Perusahaan sebesar 10,45% dan Real Estate sebesar 8,64%.

Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -0,60% dan lapangan usaha Konstruksi sebesar -0,02%.

Tabel 1.10
Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2022-2025 (persen)

Lapangan Usaha/ Kategori	Laju Pertumbuhan			
	2022	2023	2024 ^{*)}	2025 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,03	3,04	3,73	4,88
B. Pertambangan & Penggalian	2,62	3,53	4,03	1,70
C. Industri Pengolahan	1,98	3,42	4,65	3,49
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	4,81	2,17	2,66	3,31
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	2,17	2,87	2,57	6,16
F. Konstruksi	3,03	6,40	6,52	-0,02
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,57	5,80	4,44	6,15
H. Transportasi dan Pergudangan	12,96	13,12	6,33	10,74
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,26	10,23	11,98	4,37
J. Informasi dan Komunikasi	7,60	7,81	7,41	6,52
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,81	5,50	3,87	3,10
L. Real Estate	4,53	3,19	5,41	8,64
M,N. Jasa Perusahaan	8,78	6,69	5,12	10,45
U. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,73	1,92	6,08	-0,60
V. Jasa Pendidikan	5,14	7,38	5,66	4,16
W. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	4,83	6,44	5,12	8,34
R,S,T,U. Jasa Lainnya	8,72	9,47	6,54	3,36
PDRB	4,73	5,01	5,03	4,53

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Pada tahun 2025, jika dilihat dari sisi pengeluaran, komponen Ekspor Barang dan Jasa merupakan komponen pengeluaran yang mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 10,24% atau dari Rp.276,53 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp.304,86 triliun pada tahun 2025. Selanjutnya diikuti

oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang tumbuh sebesar 4,74%, meningkat dari Rp.317,90 triliun menjadi Rp.332,95 triliun. Selanjutnya disusul oleh komponen Impor sebagai komponen pengurang yang tumbuh sebesar 3,73%, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) tumbuh sebesar 3,36%. Kemudian komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) tumbuh sebesar 0,14% dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 0,56% pada tahun 2025.

Tabel 1.11
PDRB Provinsi Sumatera Utara menurut Komponen
Pengeluaran 2024-2025 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2024 ^{*)}	2025 ^{**)}	2024 ^{*)}	2025 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	583.173,30	631.894,58	317.890,13	332.948,31
2. Konsumsi LNPRT	10.524,20	11.154,49	7.134,31	7.374,27
3. Konsumsi Pemerintah	64.752,35	66.175,68	37.151,38	37.202,58
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	328.629,53	336.386,34	190.051,10	191.108,51
5. Perubahan Inventori	15.774,69	1.623,62	9.313,07	922,56
6. Ekspor Barang dan Jasa	450.239,70	516.023,08	276.532,14	304.859,45
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	306.174,02	327.064,22	205.537,39	213.211,52
PDRB	1.146.919,75	1.236.193,57	632.534,73	661.204,18

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat sementara

Struktur PDRB Sumatera Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Komponen PK-RT sebesar 51,12%. Komponen Ekspor Barang dan Jasa menempati urutan kedua sebesar 41,74%, disusul

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 27,21%, Komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 5,35%, Komponen Konsumsi LNPRT sebesar 0,90% dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,92%. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 26,46%.

Tabel 1.12
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Tahun 2022-2025 (persen)

Komponen Pengeluaran	Distribusi PDRB			
	2022	2023	2024 ^{*)}	2025 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	50,49	50,72	50,85	51,12
2. Konsumsi LNPRT	0,85	0,88	0,92	0,90
3. Konsumsi Pemerintah	6,00	5,84	5,65	5,35
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,57	29,52	28,65	27,21
5. Perubahan Inventori	1,87	1,91	1,38	0,13
6. Ekspor Barang dan Jasa	41,77	37,62	39,26	41,74
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	30,56	26,48	26,70	26,46
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat sementara

PDRB perkapita adalah nilai PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Provinsi Sumatera Utara selama 3 (tiga) tahun terakhir selalu mengalami peningkatan PDRB perkapita. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 8,60%, yaitu dari Rp.62,08 juta pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp.67,42 juta pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025 tumbuh sebesar 7,76% dengan nilai sebesar Rp.72,65 juta.

Tabel 1.13
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2022-2025 (persen)

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB			
	2022	2023	2024^{*)}	2025^{**)}
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
01. Nias	3,06	3,82	3,89	3,63
02. Mandailing Natal	4,34	4,93	4,83	4,38
03. Tapanuli Selatan	4,78	5,11	5,12	4,39
04. Tapanuli Tengah	4,18	4,23	4,15	3,25
05. Tapanuli Utara	4,25	4,75	4,77	4,58
06. Toba	4,24	4,93	4,84	4,10
07. Labuhanbatu	4,80	5,03	5,06	4,18
08. Asahan	4,66	4,87	4,68	4,60
09. Simalungun	4,68	5,07	4,89	4,73
10. Dairi	4,21	5,04	4,97	4,52
11. Karo	4,22	5,06	4,22	4,23
12. Deli Serdang	4,70	5,34	5,36	4,55
13. Langkat	4,69	4,93	4,98	4,10
14. Nias Selatan	3,08	3,65	3,82	3,04
15. Humbang Hasundutan	4,21	4,38	4,79	3,80
16. Pakpak Bharat	4,27	5,10	5,02	5,47
17. Samosir	4,48	5,03	5,02	4,14
18. Serdang Bedagai	4,46	5,03	5,01	5,07
19. Batu Bara	4,07	4,08	4,12	3,39
20. Padang Lawas Utara	4,12	4,92	4,99	4,27
21. Padang Lawas	4,61	5,14	5,02	4,19
22. Labuhanbatu Selatan	4,74	4,94	4,89	4,70
23. Labuhanbatu Utara	4,62	4,76	4,24	4,14
24. Nias Utara	3,03	3,79	3,64	3,40
25. Nias Barat	3,01	3,72	3,89	2,23
26. Sibolga	4,15	4,20	3,92	3,03
27. Tanjungbalai	3,94	4,86	4,91	4,76
28. Pematang Siantar	3,47	4,22	4,61	4,09
29. Tebing Tinggi	4,01	3,98	3,37	3,07
30. Medan	4,71	5,04	5,07	5,10

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB			
	2022	2023	2024*)	2025**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31. Binjai	4,18	4,75	4,66	4,50
32. Padang Sidempuan	4,77	5,09	5,01	4,82
33. Gunungsitoli	3,11	3,69	3,84	3,43
Sumatera Utara	4,73	5,01	5,03	4,53

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2025 atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan pertumbuhan yang positif pada kisaran 2,23% persen sampai dengan 5,47%. Dan terdapat 3 (Tiga) kabupaten/kota yang tumbuh diatas 5%. Kabupaten Pakpak Bharat merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 5,47%, diikuti oleh Kota Medan sebesar 5,10%, dan Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 5,07%. Sedangkan Kabupaten Nias Barat merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi paling rendah yaitu sebesar 2,23%.

Tabel 1.14
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2024 – 2025 (miliar rupiah)

Kabupaten/Kota	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2024*)	2025**)	2024*)	2025**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Nias	5.304,62	5.668,82	2.964,34	3.072,05
02. Mandailing Natal	20.279,38	22.043,92	11.001,61	11.483,68
03. Tapanuli Selatan	21.276,31	23.638,00	11.620,33	12.129,95
04. Tapanuli Tengah	13.671,28	14.559,65	8.084,42	8.347,56
05. Tapanuli Utara	11.279,15	12.051,74	6.931,24	7.248,51
06. Toba	10.284,43	10.831,86	6.478,13	6.743,59
07. Labuhanbatu	50.801,78	54.829,28	27.924,86	29.092,77

Kabupaten/Kota	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2024 ^{*)}	2025 ^{**)}	2024 ^{*)}	2025 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
08. Asahan	57.457,93	63.144,24	31.341,30	32.783,93
09. Simalungun	58.906,11	64.810,17	33.052,35	34.616,99
10. Dairi	12.693,88	13.617,06	7.631,31	7.976,35
11. Karo	28.867,89	30.462,81	16.641,17	17.345,36
12. Deli Serdang	151.451,40	162.247,88	83.868,36	87.683,33
13. Langkat	62.411,48	68.152,02	34.880,49	36.311,27
14. Nias Selatan	9.128,45	9.629,63	4.806,33	4.952,27
15. Humbang Hasundutan	8.272,39	8.831,08	4.808,86	4.991,83
16. Pakpak Barat	1.718,75	1.871,67	1.003,95	1.058,92
17. Samosir	6.100,41	6.509,11	3.644,15	3.794,86
18. Serdang Bedagai	42.012,01	46.220,20	22.883,58	24.043,80
19. Batubara	47.317,58	51.388,29	27.614,17	28.549,99
20. Padang Lawas Utara	17.831,27	19.536,99	9.855,95	10.276,52
21. Padang Lawas	18.330,40	20.555,91	9.659,72	10.064,06
22. Labuhanbatu Selatan	41.909,64	46.170,50	22.619,57	23.682,47
23. Labuhanbatu Utara	36.582,00	39.677,85	20.527,76	21.378,55
24. Nias Utara	4.790,41	5.128,29	2.678,92	2.769,93
25. Nias Barat	2.531,58	2.671,71	1.427,11	1.458,90
26. Sibolga	7.201,60	7.575,00	4.055,30	4.178,00
27. Tanjungbalai	12.207,74	13.141,28	6.744,35	7.065,41
28. Pematang Siantar	17.351,67	18.451,10	10.769,97	11.210,47
29. Tebing Tinggi	7.875,11	8.265,04	4.499,55	4.637,74
30. Medan	329.609,17	353.289,26	182.242,59	191.540,51
31. Binjai	15.588,75	16.644,36	9.322,08	9.741,60
32. Padang Sidempuan	8.576,98	9.132,34	5.025,22	5.267,67
33. Gunungsitoli	7.321,91	7.647,11	3.906,89	4.040,87

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Kota Medan memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan nilai PDRB kabupaten/kota di Sumatera Utara sebesar 28,74%, dengan nilai PDRB sebesar Rp.329,61 triliun.

Kemudian disusul Kabupaten Deli Serdang yang berkontribusi sebesar 13,20%, dengan nilai PDRB mencapai Rp.151,45 triliun, kemudian Kabupaten Langkat yang berkontribusi sebesar Rp.56,19 triliun atau sebesar 5,44% terhadap total PDRB. Selanjutnya Kabupaten Simalungun sebesar 5,14%, Kabupaten Asahan berperan sebesar 5,01%, Kabupaten Labuhanbatu sebesar 4,43%, dan Kabupaten Batu Bara berperan sebesar 4,13%. Sedangkan lima kabupaten dengan kontribusi terendah yaitu Kabupaten Samosir sebesar 0,53%, Kabupaten Nias sebesar 0,46%, Kabupaten Nias Utara sebesar 0,42%, Kabupaten Nias Barat sebesar 0,22%, dan Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 0,15%.

Tabel 1.15

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2025 (ribu rupiah)

Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita		
	2023	2024 ^{*)}	2025 ^{**)}
01. Nias	31.614,35	34.085,06	35,989.52
02. Mandailing Natal	36.867,69	40.128,58	42,925.76
03. Tapanuli Selatan	60.393,71	67.226,69	73,792.66
04. Tapanuli Tengah	32.649,10	34.618,71	36,136.78
05. Tapanuli Utara	32.465,61	34.493,54	36,425.94
06. Toba	45.154,41	47.454,92	49,329.92
07. Labuhanbatu	89.062,44	97.593,45	104,031.90
08. Asahan	63.897,82	70.611,43	76,575.88
09. Simalungun	50.427,74	56.002,65	60,712.16
10. Dairi	35.877,62	38.398,10	40,478.43
11. Karo	62.759,11	67.690,16	70,507.77
12. Deli Serdang	68.922,90	73.933,55	78,077.13
13. Langkat	52.677,11	57.859,34	62,526.57
14. Nias Selatan	22.415,95	23.408,87	24,242.32
15. Humbang Hasundutan	37.396,44	39.948,56	42,161.16
16. Pakpak Bharat	28.271,07	30.576,18	32,695.23

Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita		
	2023	2024 ^{*)}	2025 ^{**)}
17. Samosir	40.017,20	42.639,03	44,948.39
18. Serdang Bedagai	54.961,49	60.742,77	66,021.60
19. Batu bara	101.676,29	108.189,10	115,739.92
20. Padang Lawas Utara	57.442,30	63.548,08	68,392.71
21. Padang Lawas	58.506,06	65.287,57	71,948.29
22. Labuhanbatu Selatan	113.617,43	124.517,23	134,912.71
23. Labuhanbatu Utara	82.791,65	89.497,47	95,497.68
24. Nias Utara	28.727,67	30.189,86	31,765.54
25. Nias Barat	24.508,63	26.031,41	26,953.22
26. Sibolga	74.736,18	78.494,15	82,119.13
27. Tanjungbalai	61.197,21	65.757,80	69,877.03
28. Pematang Siantar	59.045,87	62.629,18	66,086.06
29. Tebing Tinggi	41.518,75	43.514,42	45,172.04
30. Medan	122.591,56	132.571,06	141,412.26
31. Binjai	47.678,59	50.749,60	53,530.55
32. Padang Sidempuan	33.566,40	35.727,43	37,451.72
33. Gunungsitoli	48.460,15	50.414,89	51,839.22
Sumatera Utara	68.305,71	73.574,62	78,310.29

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

PDRB per kapita kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2025 tertinggi dicapai oleh Kota Medan yaitu sebesar Rp.141,41 juta, diikuti oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar Rp.134,91 juta, Kabupaten Batu Bara sebesar Rp.115,74 juta, Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp.104,03 juta, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp.95,50 juta. Sedangkan Kabupaten Nias Selatan merupakan kabupaten yang paling rendah nilai PDRB per kapitanya yaitu sebesar Rp.24,24 juta diikuti oleh Kabupaten Nias Barat sebesar Rp.26,95 juta, Kabupaten Nias Utara sebesar Rp.31,77 juta,

Kabupaten Pakpak Barat sebesar Rp.32,70 juta, dan Kabupaten Nias sebesar Rp.35,99 juta.

5. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.

Dari 8 kabupaten/kota penghitungan inflasi (IHK) di Sumatera Utara, Kota Gunungsitoli mengalami inflasi tertinggi selama tahun 2025 yaitu 10,84%, diikuti Kota Sibolga sebesar 5,62%, sedangkan Kabupaten Karo mengalami inflasi terendah selama tahun 2025 yaitu sebesar 3,15%.

Tabel 1.16
Perkembangan Inflasi 8 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2015-2025 (persen)

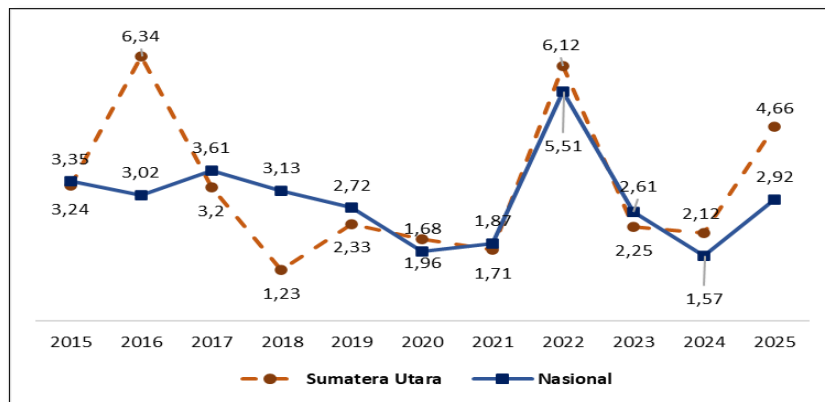
Tahun	Medan	P. Siantar	Sibolga	Padang-sidempuan	G. Sitoli	Lab. Batu	Karo	Deli Serdang	Sumatera Utara	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)	(8)
2015	3,32	3,36	3,34	1,66					3,24	3,35
2016	6,60	4,76	7,39	4,28					6,34	3,02
2017	3,18	3,10	3,08	3,82					3,20	3,61
2018	1,00	2,15	2,86	2,22					1,23	3,13
2019	2,43	1,54	2,58	2,15					2,33	2,72

Tahun	Medan	P. Siantar	Sibolga	Padang-sidempuan	G. Sitoli	Lab. Batu	Karo	Deli Serdang	Sumatera Utara	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)	(8)
2020	1,76	2,78	2,42	3,27	5,32				1,96	1,68
2021	1,70	2,12	1,86	1,49	0,54				1,71	1,87
2022	6,10	6,16	6,43	6,40	5,74				6,12	5,51
2023	2,19	2,30	2,80	2,95	2,35				2,25	2,61
2024	2,12	2,86	2,94	2,46	3,10	3,36	1,33	1,80	2,12	1,57
2025	4,36	5,37	5,62	5,46	10,84	4,74	3,15	5,16	4,66	2,92

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Selama 2025, inflasi gabungan kabupaten/kota IHK di Sumatera Utara sebesar 4,66%, angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian 2024 yang sebesar 2,12%. Inflasi Sumatera Utara lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka inflasi Nasional yang sebesar 2,92%.

Gambar 1.5
Perkembangan Inflasi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2015-2025 (persen)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

6. Perdagangan Luar Negeri

Perkembangan perdagangan luar negeri Sumatera Utara pada periode dua tahun terakhir (2024-2025) menunjukkan hasil yang positif, nilai neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara terus mengalami surplus. Tahun 2024 perdagangan luar negeri Sumatera Utara mengalami surplus sebesar US\$5,00 miliar, kemudian mengalami peningkatan menjadi US\$6,93 miliar di tahun 2025.

Dilihat dari sisi ekspor, pada periode 2019-2022 nilai ekspor Sumatera Utara terus mengalami peningkatan hingga mencapai US\$12,92 miliar pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai ekspor sebesar 19,15% dibanding tahun 2022, menjadi sebesar US\$10,45 miliar di tahun 2023. Pada tahun 2024, nilai ekspor kembali meningkat menjadi US\$10,80 miliar dan meningkat lagi di tahun 2025 menjadi US\$12,40 miliar. Di sisi lain, nilai impor mengalami penurunan bila dibandingkan nilai impor tahun 2024. Dimana nilai impor pada tahun 2024 sebesar US\$5,80 miliar menjadi US\$5,47miliar di tahun 2025.

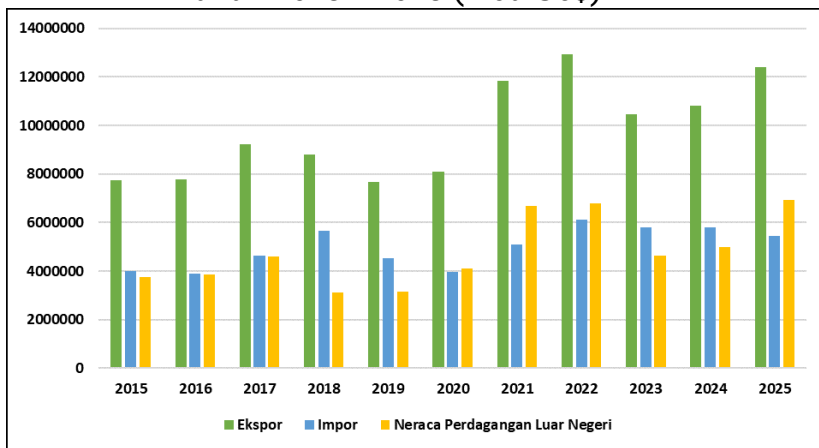
Tabel 1.17
Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara
Tahun 2015 – 2025

Tahun	Ekspor		Impor		Neraca Perdagangan Luar Negeri (Ribu US\$)
	Berat Bersih (Ton)	Nilai FoB (Ribu US\$)	Berat Bersih (Ton)	Nilai CiF (Ribu US\$)	
2015	9.008.520	7.752.786	6.853.734	3.988.440	3.764.346
2016	8.387.357	7.770.742	6.819.193	3.914.490	3.856.250
2017	8.981.772	9.225.286	7.038.772	4.635.808	4.589.478

Tahun	Ekspor		Impor		Neraca
2018	9.645.621	8.787.224	7.214.945	5.652.347	3.134.878
2019	9.529.180	7.663.174	6.301.659	4.530.324	3.152.850
2020	8.831.142	8.084.391	5.795.198	3.979.889	4.104.502
2021	9.463.706	11.850.169	6.219.931	5.091.233	6.673.182
2022	9.676.270	12.923.743	6.432.586	6.134.776	6.788.991
2023	10.625.345	10.448.833	7.109.149	5.820.823	4.628.578
2024	9.553.670	10.799.901	7.382.334	5.795.160	5.004.741
2025	9.521.367	12.396.413	6.693.371	5.467.904	6.928.510

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambar 1.6
Perkembangan Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara
Tahun 2015 – 2025 (ribu US\$)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

BAB II

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak, pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, aksesibilitas, dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan daerah secara umum dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang dihasilkan dari kolaborasi berbagai program pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Adapun urusan wajib terkait pelayanan dasar mencakup urusan pemerintahan sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Presentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	115,43% (912.988 orang anak usia 16-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas dari 790.900 orang anak usia 16-18 tahun)	87,3% (782.768 orang anak usia 16-18 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan menengah dari 896.819 orang anak usia 16-18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan)
2	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus	25,40% (1.923 orang anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan khusus dari 7.569 orang anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas)	80,47% (5.417 orang anak disabilitas usia 4-18 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan khusus dari 6.732 orang anak disabilitas usia 4-18 tahun pada provinsi yang bersangkutan)
3	Persentase toilet Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar	-	61,2% (5.534 toilet SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, SMKLB dalam kondisi baik dari 9.041 toilet)

	Biasa dalam kondisi baik		
4	Persentase ruang kelas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik	-	59,2% (16.224 ruang kelas SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, SMKLB dalam kondisi baik dari 27.388 ruang kelas)

Sumber: Dinas Pendidikan Provsu

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja urusan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sebesar Rp. 3.486.817.283.946,64 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan;
- 2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya Penganggaran dari Pusat yang Gagal Salur sehingga realisasi kegiatan tidak dilakukan;
- 2) Belum optimalnya ketersediaan akses belajar dan peningkatan sarana dan prasarana sekolah menengah Atas, Kejuruan dan Pendidikan Khusus;
- 3) Kondisi cuaca yang tidak menentu juga menjadi kendala pelaksanaan program;
- 4) Pelaksanaan Perencanaan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terkendala minimnya anggaran;
- 5) Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terkendala refocusing;
- 6) Penghitungan Kebutuhan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terkendala pada skala prioritas yang belum tersedia secara baik;
- 7) Pengumpulan Data pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terkendala reposisi personil dan job desk.

2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Rasio daya tampung Rumah Sakit	1,6% (24.897 orang daya tampung rumah sakit)	1,54 per 1.000 penduduk (24.186 orang daya

	Rujukan	seluruh provinsi dari 15.471.582 orang penduduk provinsi)	tampung Rumah Sakit Rujukan di seluruh provinsi dari 15.678.694 orang penduduk provinsi)
2	Persentase Rumah Sakit Rujukan provinsi yang terakreditasi paripurna	100% (6 Rumah Sakit Rujukan provinsi yang terakreditasi dari 6 Rumah Sakit provinsi)	100% (6 Rumah Sakit Rujukan provinsi yang terakreditasi Paripurna dari 6 Rumah Sakit Rujukan provinsi yang terakreditasi)
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100% (62.691 orang penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan Kesehatan dalam kurun waktu satu tahun dari 62.691 orang penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama)	100% (1.489.969 orang penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun dari 1.489.969 orang penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana)
4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar	100% (223.377 orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar dari 223.377	100% (10.480 orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dari 10.480 orang yang

	Biasa provinsi	orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa)
--	----------------	--	--

Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja urusan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sebesar Rp. 652.703.936.109,74 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Program Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Kemampuan tenaga kesehatan untuk mendeteksi sinyal KLB serta keterlambatan mengirimkan laporan/informasi bilamana terjadi KLB;
- 2) Kurangnya dukungan dari pengambil kebijakan di daerah dalam pelaksanaan program surveilans, dan upaya penanggulangan KLB belum optimal karena tidak ada penetapan status KLB dari kepala daerah sesuai amanat undang undang Kesehatan;

- 3) Pada beberapa KLB jumlah orang terdampak berada di kecamatan yang berbeda-beda sehingga butuh waktu untuk menentukan jumlah populasi yang berisiko;
- 4) Untuk KLB keracunan makanan pengambilan datanya belum dilakukan dengan optimal sehingga mempengaruhi dalam pemeriksaan sampel yang akan diperiksa. Sampel makanan pada KLB keracunan makanan terkadang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan laboratorium;
- 5) Adanya penolakan masyarakat untuk dilakukan penanggulangan penyakit KLB seperti diberi pengobatan dan divaksinasi;
- 6) Pemahaman tenaga klinisi terkait penyakit potensi KLB yang belum sejalan dengan program surveilans;
- 7) Keterlambatan pencatatan dan pelaporan masalah krisis kesehatan disebabkan kurangnya sumber daya manusia di Kabupaten/Kota sehingga menyebabkan tugas rangkap (*double job*);
- 8) Mitigasi dan Deteksi Dini Pra Krisis Kesehatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan pemerintah Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan mitigasi dan koordinasi bersama Lintas Sektor terkait;
- 9) Kabupaten/Kota belum menyusun kontijensi dan respons penganggulangan bencana;
- 10) Pada saat bencana yang dibutuhkan masyarakat adalah kecepatan respon pelayanan kesehatan, tetapi ternyata di lapangan masyarakat lebih membutuhkan pangan cepat saji, air bersih, tenda pengungsian

bersifat klaster serta WC umum. Sementara posko kesehatan adalah area pelayanan kesehatan.

3. Urusan Pekerjaan Umum

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum yang diperoleh oleh Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase kondisi irigasi kewenangan provinsi	59,60% (51.858,58 Ha irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan dan dipelihara di tahun eksisting dari 86.999 Ha daerah irigasi kewenangan provinsi)	55,5% (43.867,48 Ha daerah irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik dari 24.347,97 Ha daerah irigasi kewenangan provinsi)
2	Tingkat kemantapan jalan	78,13% (2.348,31 km jalan kewenangan provinsi yang mantap dari 3.005,65 km jalan keseluruhan di wilayah provinsi)	74,12% (3.005,65 km jalan kewenangan provinsi dari 2.227,69 km jalan kewenangan provinsi)
3	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan banjir yang	13,04% (63,73 Ha kawasan permukiman sepanjang Pantai rawan abrasi yang	60% (68.828,63 Ha kawasan permukiman rawan banjir yang telah

	terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS kewenangan provinsi dari 488,41 Ha Kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan provinsi	terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir kewenangan provinsi dari 114.645,48 Ha kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir kewenangan provinsi)
4	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	63,77% (2.049.612 L/s kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota dari 3.214.053 L/s kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota di provinsi bersangkutan)	30,7% (20.232 L/s kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota pada tahun N dari 66.000 L/s kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota di provinsi bersangkutan pada tahun N (non kumulatif)
5	Persentase pelayanan pengolahan limbah	48,46% (30.054,33 volume limbah yang masuk dalam SPAL	93,8% (131.326 volume limbah yang masuk dalam Sistem

	domestic oleh SPALD Regional	domestic regional dari 62.010 kapasitas pengolahan limbah SPAL domestik regional)	Pengolahan Air Limbah Domestik Regional dari 139.954 kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional)
6	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	104,97% (5.639 orang tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli dari 5.372 orang kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi)	58,8% (100 orang tenaga kerja ahli konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli dari 170 orang kebutuhan tenaga ahli konstruksi yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah provinsi)
7	Persentase penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan di provinsi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara belum pernah melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 (satu) tahun yang sudah dinilai pada tahun 2025 kewenangan penilaian dimaksud berada pada Kab/Kota

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi belanja urusan pekerjaan umum di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sebesar Rp. 1.018.342.611.026,81 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum;
- 3) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- 5) Program Pengembangan Permukiman;
- 6) Program Penataan Bangunan Gedung;
- 7) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- 8) Program Penyelenggaraan Jalan;
- 9) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- 10) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan pekerjaan umum di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Proses Pembebasan Lahan yang rumit;
- 2) Proses Perijinan di daerah kab / Kota yang rumit dan perubahan regulasi;
- 3) Koordinasi antar lembaga serta Pengambilan Keputusan yang terlalu lama karena adanya perubahan arah kebijakan dari pimpinan yang berganti;

- 4) Pada Pembangunan SPAM Regional Untuk memenuhi target sampai dengan Sambungan Rumah (SR) dibutuhkan dana anggaran yang sangat besar sehingga perlu Koordinasi dan kolaborasi dalam Penganggaran antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab / Kota serta Badan Usaha sehingga membutuhkan waktu yang panjang.

4. Urusan Perumahan

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan perumahan yang diperoleh oleh Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase warga negara korban bencana provinsi yang memperoleh rumah layak huni	0	100%
2	Persentase warga negara yang relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0	100%
3	Persentase Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang	15,34% (149,92 Ha kawasan kumuh	55,5% (10 Ha kawasan kumuh yang

	ditangani	10-15 Ha yang ditangani dari 977,24 Ha kawasan kumuh 10-15 Ha)	ditangani dari 18 Ha target luas kawasan kumuh)
--	-----------	--	---

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Provsu

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan

Realisasi belanja urusan perumahan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sebesar Rp. 37.017.936.662,27 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Perumahan;
- 2) Program Kawasan Permukiman;
- 3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);
- 4) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
- 5) Program Penatagunaan Tanah.

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan perumahan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Karena tidak terdapatnya bencana alam tingkat provinsi, maka pendataan hanya dilakukan dalam konteks pra bencana dengan menyelenggarakan kegiatan Identifikasi Perumahan di Daerah Rawan Bencana Provinsi dan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan;
- 2) Penghitungan kebutuhan tidak dilakukan sejauh ini karena tidak adanya bencana alam tingkat provinsi;

- 3) Perencanaan dan penganggaran tidak dilakukan sejauh ini karena tidak adanya bencana alam tingkat provinsi;
- 4) Tidak terdapat pelaksanaan karena tidak adanya perencanaan dan penganggaran bagi penanggulangan bencana alam;
- 5) Pemenuhan kegiatan SPM bidang Perumahan Rakyat menjadi bersifat insidental karena bergantung kepada kejadian bencana alam tingkat provinsi;
- 6) Belum optimalnya SPM Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah karena sampai saat ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara belum melakukan pendataan permukiman “Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan daerah Sempadan sungai di Provinsi Sumatera Utara.

5. Urusan Trantibum Linmas

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan trantibum linmas yang diperoleh oleh Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase dokumen	66,66% (4 dokumen)	100% (3 dokumen)

	kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	kebencanaan yang disusun dari 6 dokumen (kebencanaan yang akan disusun)	kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N dari 3 dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah provinsi)
2	Persentase penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	-	100% (308 pengaduan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani dari 308 pengaduan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan)
3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	28,125% (9 perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan dari 32 perda dan perkada yang memuat sanksi)	11,1% (2 perda dan perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan dari 18 perda dan perkada yang memuat sanksi)
4	Persentase penanganan pra bencana	54,54% (18 kab/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana dari 33 kab/kota di wilayah provinsi)	24,24% (8 kab/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana pada tahun N dari 33 target kab/kota di provinsi yang direncanakan penanganan pra bencana dan terdapat

			pada rencana kerja perangkat daerah pada tahun N)
5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	21,21% (7 kab/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana dari 33 kab/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana)	75% (18 kab/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana dari 24 kab/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana)
6	Persentase penanganan pasca bencana	-	75% (18 kab/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pasca bencana dari 24 kab/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana)

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja

B. Realisasi Belanja Urusan Trantibum Linmas

Realisasi belanja urusan trantibum linmas yang ditangani Satpol PP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sebesar Rp. 42.782.186.005,36 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Program Pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Realisasi belanja urusan trantibum linmas yang ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2025 sebesar 24.664.021.522,60 dengan program/kegiatan unggulan yaitu: Program Penanggulangan Bencana

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan trantibum linmas di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Belum terintegrasinya penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Sumatera Utara;
- 2) Belum intensifnya pelaksanaan koordinasi OPD dalam penerapan dan pemberhasilan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 3) Belum memadainya anggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 4) Kurangnya kuantitas dan kualitas personil dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
- 5) Minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal.

6. Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan sosial yang diperoleh oleh Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1,58% (810 orang penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti dari 51.184 orang penyandang disabilitas terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi social dasar di dalam panti)	100% (768 orang penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dari 768 orang penyandang disabilitas telantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sesuai hasil asesmen)
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	2,8% (396 orang anak terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti dari 12.092 orang anak terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi social dasar di dalam panti)	100% (345 orang Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dari 345 orang Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sesuai hasil asesmen)
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	0,25% (396 orang lanjut usia di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dari 158.027 orang lanjut usia terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan	100% (339 orang Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dari 339 orang Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi

		rehabilitasi sosial dasar di dalam panti)	yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sesuai hasil asesmen)
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	3,4% (250 orang gelandangan dan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dari 7.285 orang gelandangan dan pengemis terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi social dasar di dalam panti)	100% (205 orang Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dari 205 orang Gelandangan dan Pengemis Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sesuai hasil asesmen)
5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	0	100% (1.803.549 orang korban bencana alam, sosial dan non alam provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dari 1.803.549 orang korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi)
6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi	-	44.3% (1.807.322 orang penerima manfaat yang terpenuhi

	kebutuhan dasar		kebutuhan dasar dari 4.078.165 orang masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah provinsi)
--	-----------------	--	--

Sumber : Dinas Sosial Provsu

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja urusan sosial di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sebesar Rp. 89.800.473.338,44 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- 1) Program Rehabilitasi Sosial;
- 2) Program Pemberdayaan Sosial;
- 3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 5) Program Penanganan Bencana;
- 6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan sosial di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) SDM masih belum memenuhi jumlah tenaga pelayanan sosial dan pekerja sosial yang di butuhkan, diharapkan ada penyediaan CPNS untuk tahun kedepannya.
- 2) Masih rendahnya alokasi anggaran yang disediakan untuk Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara terkait

target SPM dimaksud, diantaranya Sandang belum memenuhi kualitas pelayanan minimal, serta sarana Prasaran panti yang masih butuh perhatian serius untuk memenuhinya.

BAB III
HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN OPINI LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN
SEBELUMNYA

A. EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh skor 2,8301 dengan status “Sedang”.

Sedangkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2024, belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

Berikut hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 – 2024.

Tabel 3.1
Hasil Evaluasi Terhadap LPPD Provsu Tahun 2022 – 2024

No	Tahun Evaluasi	Skor	Status	Peringkat Nasional
1	2022	3,43	Tinggi	8
2	2023	2,9354	Sedang	22
3	2024	2,8301	Sedang	21
4	2025	Belum Rilis		

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu

B. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memperoleh 10 kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah

2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Capaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar 80% dari target 80%.

3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Capaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemendagri Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%.

4. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, unsur pengendalian terdiri dari 5 unsur yaitu: lingkungan, pengendalian,

penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan pengendalian internal menuju level 3,5.

5. Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat

Meningkatnya level kapabilitas APIP Inspektorat, sesuai Perka BPKP No. 16 Tahun 2015, kapabilitas diukur dari 6 elemen area perubahan yaitu: Peran dan layanan manajemen SDM praktik profesional akuntabilitas dan manajemen kinerja hubungan dan budaya organisasi struktur tata kelola menuju level 3+.

BAB IV

RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan disetujui oleh DPRD untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat daerah selama satu tahun anggaran. Struktur APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara (Unaudited) Tahun 2025, Realisasi Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 mencapai sebesar Rp. 12.027.332.189.656,26 dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 mencapai Rp. 11.088.893.329.439,36.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan. Kebijakan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan

dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.
2. Pendapatan Transfer, meliputi: Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa, Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil, dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Secara rinci realisasi anggaran pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025

JENIS PENDAPATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.419.301.627.754,00	5.686.332.189.656,26	88,59
Pajak Daerah	5.605.254.375.313,00	5.062.104.690.315,09	90,31
Retribusi Daerah	192.531.703.635,00	208.476.146.302,52	108,28
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	353.166.995.232,00	329.075.868.190,00	93,18
Lain-lain PAD yang Sah	268.348.553.574,00	86.809.132.332,65	32,35
PENDAPATAN TRANSFER	5.907.944.781.000,00	5.937.997.803.485,00	100,51
Pendapatan	5.907.944.781.000,00	5.937.997.803.485,00	100,51

JENIS PENDAPATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
Transfer			
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	407.863.968.629,00	402.754.580.542,00	105,75
Pendapatan Hibah	6.300.000.000,00	6.282.708.000,00	99,73
Dana Darurat	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
Lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	354.554.453.629,00	376.471.872.542,00	106,18
PENDAPATAN DAERAH	12.708.100.862.383,00	12.027.332.189.656,26	94,64

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provsu, diolah dari e-keuangan Provsu (data sementara SIPD RI)

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban dalam 1 tahun anggaran. Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, yakni:

1. Kondisi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja;
2. Pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah;
3. Langkah-langkah strategis daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi, meliputi: Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
2. Belanja Modal, meliputi: Belanja Tanah; Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Bangunan dan gedung; Belanja Jalan; Belanja Irigasi dan Jaringan; Belanja Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga;
4. Belanja Transfer meliputi Belanja Bagi Hasil; Belanja Bantuan Keuangan.

Secara rinci realisasi belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025

JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	(%)
BELANJA DAERAH	12.507.012.266.279,56	11.505.837.768.759,97	92,00
BELANJA OPERASI	7.354.037.091.904,56	7.093.261.964.818,66	96,45
Belanja Pegawai	3.564.822.018.789,92	3.554.032.291.729,80	99,70
Belanja Barang dan Jasa	2.891.751.233.984,64	2.726.008.931.921,86	94,27
Belanja Hibah	882.656.024.000,00	799.152.656.001,00	90,54
Belanja Bantuan Sosial	14.807.815.130,00	14.068.085.166,00	95,00

JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	(%)
BELANJA MODAL	1.371.853.825.344,00	1.217.262.853.771,51	88,73
Belanja Modal Tanah	7.363.233.952,00		0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	352.364.968.819,00	326.728.867.489,00	92,72
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.136.889.681,00	156.913.073.342,84	89,59
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	698.166.570.044,00	596.142.299.760,67	85,39
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	136.521.108.508,00	135.862.052.429,00	99,52
Belanja Modal Aset Lainnya	2.301.054.340,00	1.616.560.750,00	70,25
BELANJA TIDAK TERDUGA	98.340.847.728,00	67.551.879.437,80	68,69
Belanja Tidak Terduga	98.340.847.728,00	67.551.879.437,80	68,69
BELANJA TRANSFER	3.682.780.501.303,00	3.127.761.070.732	84,93
Belanja Bagi Hasil	3.554.256.970.681	2.979.389.050.110	83,83
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	128.523.530.622,00	148.372.020.622,00	115,44

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu Tahun Anggaran 2025
Keterangan : Data Unaudited

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Selain komponen pendapatan dan belanja daerah, struktur APBD juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah

pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit.

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus, mencakup penerimaan (pinjaman, SiLPA, hasil investasi) dan pengeluaran (pembayaran utang pokok, penyertaan modal, pembentukan dana cadangan) yang harus dibayar kembali atau diterima kembali, dengan tujuan pembiayaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah secara mandiri dan berkelanjutan. Sumbernya bisa dari internal (PAD, hasil investasi) atau eksternal (transfer pusat, pinjaman daerah, obligasi daerah).

Pembiayaan Daerah juga berfungsi untuk menyeimbangkan antara Pendapatan dan Belanja Daerah, SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, mengingat SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

Pembiayaan, terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; Penerimaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan, mencakup: Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo; Penyertaan Modal Daerah; Pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan.

Secara rinci realisasi pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 berdasarkan jenis pembiayaan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2025

JENIS PEMBIAYAAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.992.525.896,56	10.992.525.896,56	100
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.992.525.896,56	10.992.525.896,56	100
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	(39.007.474.103,44)	10.992.525.896,56	(28,18)

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu Tahun Anggaran 2025
Keterangan : Data Unaudited

BAB V

INOVASI DAERAH

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyelenggarakan beberapa acara inovasi utama pada tahun 2025 untuk mendorong transformasi daerah, di antaranya adalah North Sumatera Innovation Day (NSID) 2025 (19-20 November) dan Pekan Inovasi & Investasi Sumatera Utara 2025 (20-23 Agustus). Fokus utama adalah pada hilirisasi, Smart Province, dan kreativitas masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan. Acara-acara ini bertujuan meningkatkan daya saing daerah, mendukung UMKM naik kelas, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif melalui kolaborasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025, Provinsi Sumatera Utara mendapat peringkat ke-9 dengan skor indeks sebesar 64,79 predikat inovatif. Dimana telah terjadi peningkatan inovasi daerah di Provinsi Sumatera Utara yang sebelumnya pada tahun 2024 yang hanya memiliki skor 59,93.

Berikut adalah inovasi daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, yaitu:

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	Kelas Perempuan Mandiri Berbahaya (Kelapa Muda)	Kelas Pembelajaran Non Formal guna menumbuhkan dan memperkuat kepemimpinan perempuan akar rumput agar

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
	Anak dan Keluarga Berencana	Sumatera Utara	memiliki kesadaran kritis, kepedulian, solidaritas, dan kecakapan hidup, sehingga lebih berdaya dalam menyelesaikan persoalan dirinya, keluarganya dan mampu ikut serta melakukan perubahan sosial di lingkungannya. Selain itu, dengan kerja sama berbagai pihak hal ini juga menimbulkan tanggung jawab sosial dalam melakukan pemberdayaan perempuan.
2	Badan Kepegawaian	e-Kinerja Sumut	Aplikasi berbasis elektronik e-Kinerja Sumut yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Kinerja Sumut adalah aplikasi berbasis web dan android yang digunakan dalam penyusunan SKP, pengisian aktivitas kerja, perekaman kehadiran, dan penilaian kinerja serta dapat memberikan informasi pendukung lainnya kepada Pejabat Penilai Kinerja dan Pegawai yang dinilai.
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sistem Penyelenggaraan Informasi Tata Ruang (SIPINTAR)	Aplikasi yang menyediakan Informasi Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Utara, yang memberi kemudahan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat/swasta untuk mengetahui informasi penataan ruang.
4	Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu	Aplikasi Progress Report Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara	Penggunaan teknologi informasi untuk perbaikan tata kelola administrasi pengendalian dan pelaporan pembangunan dan Efisiensi anggaran dan efisiensi waktu. Data laporan realisasi Kegiatan Fisik Perangkat Daerah tersaji dengan cepat dan akurat

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			dan Termonitornya laporan realisasi Kegiatan Fisik Perangkat Daerah secara transparan oleh semua pihak.
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Fasilitasi Standarisasi dan Peningkatan Pendapatan 1000 (seribu) IKM melalui Digitalisasi Pemasaran	Inovasi ini bertujuan untuk: Mendorong IKM untuk mengadopsi teknologi digital dalam pemasaran mereka, Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan IKM dalam hal pemasaran online, Meningkatkan standar kualitas dan daya saing produk IKM., dan Meningkatkan pendapatan IKM melalui akses yang lebih luas ke pasar online.
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sistem Informasi Pengelolaan Sungai (SIPENGSUI)	Aplikasi yang memberikan informasi publik terkait pengelolaan sungai di provinsi sumatera utara berbasis website serta pelayanan data pengelolaan sungai.
7	UPTDK Rumah Sakit Umum Haji	Pelayanan Kesehatan Kerja Terintegrasi (PEKERTI)	Program Pelayanan Kesehatan Kerja RSU Haji Medan Sebagaimana pelayanan kesehatan masyarakat pada umumnya, dalam perusahaan juga memiliki program pelayanan dalam kesahatan karyawannya. Program ini dilaksanakan dengan pendekatan menyeluruh (komprehensif) yaitu meliputi pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.
8	Dinas Perhubungan	SIMANTANGADIS (Sistem Informasi Manajemen Transportasi Jalan Berkeselamatan Berbasis GIS)	Sistem Informasi Manajemen Transportasi Jalan Berkeselamatan Berbasis GIS (SIMANTANGADIS) dapat menjadi alat yang bermanfaat bagi petugas lapangan yang melakukan survey fasilitas

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			keselamatan yang ada disepanjang ruas jalan provinsi sumatera utara, sistem ini juga bermanfaat untuk masyarakat umum yang ingin melaporkan kerusakan fasilitas keselamatan jalan melalui kanal aduan masyarakat pada website simantangadis.
9	Dinas Pendidikan	Kampung Beasiswa	Program Kampung Beasiswa di Provinsi Sumatra Utara bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah pedesaan dan menciptakan dampak positif yang lebih luas dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan manusia di wilayah pedesaan tersebut. Terselenggaranya penyebaran Informasi dan publikasi beasiswa melalui media sosial (Instagram dan Facebook) Terlaksananya Sosialisasi beasiswa kepada Pelajar SMA/SMK Se-Sumatera Utara Terlaksananya Pelatihan Pelatihan (Penulisan Essay, Penulisan Karya Ilmiah, dan Bahasa Inggris) Terlaksananya Tes Toefl Penandatanganan Memorandum of Acknowledgment dengan beberapa kampus baik PTN maupun PTS di Sumatera Utara Kerjasama dengan Beberapa Konsulat Negara Sahabat yang ada di Sumatera Utara untuk Beasiswa Luar Negeri.
10	Dinas Perumahan dan Kawasan	Sistem Informasi Pemantauan Tenaga Lapangan	Kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni masih menghadapi kendala serius, yaitu sistem

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
	Permukiman	(SIMANTEL)	pelaporan manual yang tidak efisien dan kurang akuratnya data titik koordinat tanpa dukungan sistem informasi geospasial. Aplikasi SIMANTEL diciptakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data dan informasi terkait dengan RTLH, meningkatkan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data, meningkatkan kualitas program rehabilitasi RTLH, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi program rehabilitasi RTLH, serta tersajinya data geografis dalam bentuk peta, grafik, atau model 3D yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan data penerima manfaat.
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Layanan Bergerak Perizinan Berusaha Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Inovasi "Layanan Bergerak Perizinan Berusaha Pemerintah Provinsi Sumatera Utara" dengan menggunakan konsep bus merupakan terobosan dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Keunggulan utamanya adalah mobilitas dan aksesibilitas, memungkinkan layanan perizinan hadir di lokasi-lokasi strategis, termasuk daerah terpencil yang sulit dijangkau. Pendekatan on-the-spot service ini mengurangi beban waktu dan biaya bagi pelaku usaha. Selain itu, inovasi ini mengintegrasikan sosialisasi, konsultasi, dan proses perizinan langsung dalam satu unit

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			bergerak, yang didukung oleh sistem aplikasi online untuk transparansi dan efisiensi administrasi. Hal ini secara langsung meningkatkan jumlah usaha legal, memperkuat basis data daerah, dan membangun citra pemerintah yang responsif dan inovatif.
12	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Pendataan Perpustakaan Se-Sumatera Utara Melalui Aplikasi Direktori Satu Data Perpustakaan Sumatera Utara (DRONE SUMUT)	Transformasi dari sistem manual ke sistem digital yang terintegrasi bukan hanya meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, tetapi juga memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat literasi dan pembelajaran masyarakat.
13	Dinas Sosial	Forum Diskusi Dan Launching Gerakan Kesetiakawanan Sosial Serentak Dan Forum Diskusi Penanganan Kemiskinan Lintas OPD Se-Sumatera Utara	Inovasi ini menonjolkan beberapa keunggulan dan kebaharuan: 1. Pendekatan "serentak" se-Sumatera Utara, yang memastikan jangkauan bantuan yang luas dan terkoordinasi di seluruh kabupaten/kota. 2. Model kolaborasi Penta Helix (khususnya pemerintah dengan dunia usaha/industri) yang sangat konkret melalui dukungan penuh CSR PT. BANK SUMUT, menunjukkan pola pendanaan inovatif di luar APBN/APBD. 3. Diversifikasi jenis bantuan yang disalurkan, tidak hanya sembako tetapi juga alat bantu

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			disabilitas, nutrisi tambahan, dan sunat massal, menunjukkan respons yang lebih komprehensif terhadap berbagai kebutuhan PPKS.
14	Badan Pendapatan Daerah	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Secara Non Tunai/Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)	Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah sistem pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh metode pembayaran nontunai di Indonesia. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan QRIS adalah salah satu inovasi untuk kemudahan pembayaran, jaminan kepastian jumlah pembayaran, dan dapat menekan angka tunggakan PKB dan BBNKB.
15	Badan Pendapatan Daerah	E SAMSAT SUMUT	E-Samsat telah mempermudah akses pembayaran pajak kendaraan bermotor secara digital. Hal ini meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, khususnya di wilayah urban seperti Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Sejak diimplementasikan, terjadi tren peningkatan pendapatan dari sektor PKB dan BBNKB. Digitalisasi sistem meminimalkan kebocoran dan memperluas basis wajib pajak yang aktif membayar. Waktu yang dibutuhkan untuk

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			<p>menyelesaikan proses pembayaran pajak berkurang drastis, dari sebelumnya 30 60 menit menjadi kurang dari 5 menit melalui sistem daring. E-Samsat berhasil mengintegrasikan data antara Bapenda, Ditlantas Polda Sumut, PT Jasa Raharja, dan Bank Sumut. Kolaborasi ini menciptakan layanan publik yang lebih sinkron, efisien, dan akuntabel.</p>
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	SIRINOV SMART (Kolaborasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Penerapan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara Terintegrasi)	<p>Peningkatan kualitas inovasi dan riset melalui wadah aplikasi yang bersifat multipurposes yang dibangun melalui tahapan waktu, meliputi inventarisasi hasil riset dan inovasi Provinsi dan Kabupaten/Kota; sosialisasi, coaching clinic inovasi berkualitas dan berkelanjutan; verifikasi awal peningkatan kematangan parameter kualitas inovasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; terintegrasinya wadah planning innovation, replikasi inovasi, kolaborasi kemitraan pentahelix serta monitoring dan evaluasi pemanfaatan riset dan inovasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Integrasi pemanfaatan hasil riset menjadi Inovasi Daerah melalui suatu wadah aplikasi kolaborasi kemitraan pentahelix antar Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Akademisi, Pelaku Usaha/Bisnis/BUMD serta Komunitas melalui Pemanfaatan</p>

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Inovasi Daerah; Penggunaan aplikasi SIRINOV SMART dalam kolaborasi bersama untuk pencapaian skor Indeks Inovasi Daerah SANGAT INOVATIF untuk Provinsi Sumatera Utara; Meningkatnya Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Utara.
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Portal Satu Data Indonesia (SADAINA)	<p>Sadaina Sumut merupakan sistem terintegrasi yang memungkinkan perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara mengelola dan mempublikasikan data, sehingga data dapat diakses secara terbuka dalam berbagai visualisasi yang menarik.</p> <p>Inovasi Portal Satu Data Sumatera Utara atau Sadaina Sumut menghasilkan berbagai perubahan ke arah yang lebih baik dalam pengumpulan dan publikasi Data. Inovasi ini juga sangat membantu pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan Data yang akurat. Inovasi ini membantu Pemerintah memantau kinerja sektor-sektor kunci, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan lebih efektif.</p> <p>Data yang terkumpul dan tersedia secara terpadu memungkinkan analisis yang mendalam terhadap progres pembangunan di berbagai bidang dan dengan akses mudah ke Data yang relevan dan up-to-date,</p>

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih baik dan berdasarkan Data yang tersedia dan bagi Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dari mana saja, kapan saja tanpa terhalang birokrasi dan geografis.
18	Biro Hukum Setdaprovsu	Sistem Informasi Database Bantuan Hukum Daerah (Sidbankumda)	Untuk mewujudkan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan memberikan kontribusi yang signifikan guna terlaksananya kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dapat terlaksana secara merata demi terwujudnya Sumatera Utara yang Maju dan Bermartabat.
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sistem Informasi Antisipasi Narkoba Menuju Sumatera Utara Bersih Narkoba (SIAP BERSINAR)	Aplikasi Sistem Informasi Antisipasi Narkoba Menuju Sumut Bersinar (SIAP) akan menjadi alat relawan anti Narkoba untuk meaporkan peredaran gelap Narkoba kepada aparat penegakan hukum yang melindungi identitas diri dan keluarga, memberikan layanan edukasi terhadap bahaya Narkotika di Masyarakat yang mudah untuk diakses dan up to date sehingga dengan adanya edukasi tersebut mampu memberikan wawasan tentang peran dari komponen masyarakat dalam hal pencegahan Narkoba, menjadi alat/sarana untuk memfasilitasi masyarakat dalam informasi pelaksanaan rehabilitasi Narkoba.
20	Dinas Koperasi,	FAST TRACK	Inovasi ini merupakan suatu

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
	Usaha Kecil dan Menengah	DIGITALISASI 1000 KUMKM	<p>kegiatan berkesinambungan dengan kurikulum yang komprehensif dan penyediaan fasilitasi bagi KUMKM.</p> <p>Inovasi ini bertujuan untuk: 1) Mendorong KUMKM untuk mengadopsi teknologi digital dalam pemasaran mereka; 2) Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan KUMKM dalam hal pemasaran online; 3) Meningkatkan standar kualitas dan daya saing produk KUMKM; dan, 4) Meningkatkan pendapatan KUMKM melalui akses yang lebih luas ke pasar online.</p> <p>Penerima manfaat inovasi adalah pelaku KUMKM dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.</p> <p>Tahapan inovasi terdiri dari: Persiapan, Perencanaan, Implementasi, serta Monitoring dan Evaluasi.</p> <p>Ruang lingkup pelaksanaan inovasi.</p> <p>Manfaat inovasi antara lain KUMKM memperoleh sertifikasi dan perizinan serta mampu memasarkan produk secara digital.</p> <p>Dampak inovasi antara lain: meningkatnya cakupan pemasaran produk serta meningkatnya kualitas dan kuantitas produk, sehingga produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk lainnya di pasar nasional bahkan global.</p>

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	Inovasi Pemijahan Alami Ikan Batak Menggunakan Bak Resirkulasi Buatan	Ikan batak merupakan komoditas yang biasanya digunakan pada upacara adat khususnya suku batak. Inovasi ini diciptakan untuk meningkatkan produksi benih ikan batak yang lestari dan untuk menghindari kematian induk saat pemijahan. Bak Pemijahan alami ikan batak yang dibuat sedemikian rupa seperti kondisi habitatnya dengan sistem resirkulasi dipergunakan untuk melakukan pemijahan ikan batak dibanyak tempat dan tidak harus di daerah aliran sungai. Dampak inovasi ini adalah memberikan solusi produksi benih ikan batak berbasis budidaya, sehingga kegiatan penangkapan benih dari alam dapat dihindari dan kelestarian ikan batak di perairan umum Sumatera Utara tetap terjaga dan dapat menjadi mata pencaharian masyarakat. Dampak lain yang diharapkan dengan inovasi ini adalah dapat menghasilkan induk-induk yang unggul dan adaptif terhadap kegiatan budidaya.
22	Dinas Pendidikan	Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)	Manfaat: 1. Kemudahan Pendaftaran Proses pendaftaran menjadi lebih cepat dan efisien karena dilakukan secara online. Siswa tidak perlu datang ke kampus untuk mengisi formulir secara manual.

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			<p>2. Akses Informasi Terpusat Menyediakan informasi lengkap tentang jalur seleksi (SNBP, SNBT, Mandiri), jadwal, persyaratan, dan kuota di berbagai PTN/PTS. Memudahkan siswa dalam membandingkan program studi dan perguruan tinggi.</p> <p>3. Transparansi Hasil Seleksi Hasil seleksi (seperti SNBP atau SNBT) dapat dilihat langsung melalui aplikasi. Meminimalkan kecurangan karena prosesnya terdigitalisasi.</p> <p>4. Notifikasi Pengingat Siswa mendapatkan pemberitahuan tentang tahapan pendaftaran, pengumuman, dan jadwal penting sehingga tidak ketinggalan informasi.</p> <p>5. Efisiensi Biaya Waktu Mengurangi biaya transportasi dan administrasi karena proses dilakukan secara daring. Mempercepat verifikasi dokumen tanpa harus antre.</p>
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Asuransi Nelayan Sumatera Utara	Program Asuransi Nelayan ini dimaksudkan agar aktivitas nelayan baik saat melakukan aktifitas penangkapan ikan di laut maupun melakukan aktifitas didarat dapat terlindungi, dan apabila ada resiko yang terjadi,

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			<p>keluarga nelayan memperoleh bantuan kepada nelayan tersebut, sebagai wujud keberpihakan pemerintah dalam upaya melindungi nelayan yang mengalami kecelakaan, baik yang mengakibatkan kematian /hilang di laut/perairan, cacat tetap, biaya pengobatan, sebagai akibat kecelakaan saat melakukan aktivitas penangkapan ikan atau selain aktivitas penangkatan ikan.</p> <p>Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan pemberian bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi pekerja rentan/Nelayan di tahun 2025.</p>
24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bank Sampah Induk Rumah Hijau (Sajadah: Sampah Jadi Berkah)	Bank Sampah Induk sebagai Pusat Budidaya Maggot, Pusat Daur Ulang Sampah dan Pusat Edukasi Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah Bank Sampah Induk Rumah Hijau telah mendorong gerakan ekonomi sirkular melalui transaksi nasabah bank sampah Bank Sampah Induk Rumah Hijau yang terintegrasi dengan Sajadah mendukung green culture dan Penerapan Zero Waste di Intern DLHK.
25	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Petani Milenial	Pembinaan petani muda milenial telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor pertanian. Generasi muda dengan semangat inovasi dan kreativitasnya telah membawa angin segar dalam dunia pertanian yang semakin modern.

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			Berikut adalah beberapa hasil konkret dari pembinaan tersebut: adopsi teknologi pertanian, inovasi produk dan proses, dan pemanfaatan sumber daya local.
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera	Inovasi "Penilaian Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera" merupakan salah satu strategi untuk pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan para Warga Binaan yang berasal dari tiga rawan, rawan ekonomi, rawan kesehatan, rawan pendidikan dan kader TP. Program ini juga menggunakan pendekatan lintas sektor dan terpadu untuk meningkatkan peran perempuan menuju keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini menghasilkan Desa/Kelurahan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan program di masa datang sehingga peranan wanita dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lingkungan dapat meningkat.
27	Inspektorat	Sistem Informasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (SIDAKSIAP)	Aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (SIDAKSIAP) diciptakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses tindak lanjut terhadap laporan hasil pemeriksaan inspektorat. Melalui integrasi teknologi informasi

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			yang canggih dengan praktik terbaik dalam manajemen tindak lanjut, Aplikasi SIDAksiAP membawa perubahan yang signifikan dalam cara inspektorat beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat.
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan E-Learning SIBERMARTABAT berupa E-Sertifikat	Inovasi ini memberikan jaminan keamanan transaksi elektronik dalam mendukung tata pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik. E-sertifikat memberikan jaminan otentikasi data karena dapat menunjukkan langsung pemilik dari sertifikat di dalam suatu dokumen, kemudian integritas karena pada sertifikat elektronik menjamin keutuhan data dengan melihat apakah ada suatu perubahan di dalam dokumen yang telah ditandatangani, dan anti penyangkalan karena dapat langsung dibuktikan waktu penandatanganan serta dapat menyangkal pemalsuan dari suatu keutuhan data, dimana sasaran e-sertifikat adalah peserta yang telah mengikuti pelatihan dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
29	Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	Pelayanan Kesehatan Jiwa Bagi Pasien Non Register	Memperudahkan pasien ODGJ yang non register untuk mendapatkan klaim dengan bekerja sama dengan dinas terkait, Telah terbentuk Kerjasama/MoU dengan Dinas kesehatan, Provinsi Sumatera Utara dan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			Deliserdang. Pasien ODGJ yang Non Register ini diharapkan mendapatkan kartu BPJS - KIS dengan terdaftar sebagai anggota PBI.
30	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	HARKOP FESTIVAL SUMUT 2024: LOGIN KOPERASI	<p>Harkop Festival Sumut 2024 adalah sebuah Gerakan dan momentum untuk mendorong transformasi koperasi agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman, menarik minat generasi muda, dan memperkuat ekosistem koperasi yang tangguh dan berdaya saing di Sumatera Utara, dengan membangun kembali semangat berkoperasi secara kolaboratif, modern, dan inklusif melalui agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gerakan Bangga Berkoperasi 2. Coop Gathering (Funwalk-Senam Bersama-Fashion Show-Lucky Draw-Pameran Produk Koperasi) 3. Koperasi Award (Seminar Nasional Awarding tokoh dan pegiat koperasi Sumatera Utara) 4. #LoginKoperasi (Lomba Gebrakan Ide Bisnis Koperasi) 5. Duta Koperasi 6. Lomba Essay Koperasi (Kategori Umum dan Pemuda) 7. Lomba Mars Koperasi
31	Biro Perekonomian	Aplikasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi	Aplikasi yang memudahkan sistem pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi yang selama ini dilakukan secara konvensional

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
		Sumatera Utara	dapat dibangun dalam satu sistem aplikasi pengawasan penyaluran sesuai kebutuhan dan penggunaan yang lebih efektif efisien dan real time, memudahkan semua pihak. Aplikasi ini dapat diakses oleh admin dari masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan memberikan 1 (satu) username dan Password untuk menyampaikan laporan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan kegiatan KP3 di daerah masing-masing.
32	Dinas Ketenagakerjaan	Respek Sumut Hebat	Memberikan kemudahan bagi pengguna layanan dalam penyampaian laporan kegiatan riksa uji yang dilaksanakan oleh Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) dan penerbitan Surat Keterangan Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat K3.
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Pusat informasi kebencanaan 24 jam memungkinkan respons yang lebih cepat dan efisien terhadap bencana. Pendataan yang terintegrasi memastikan data bencana yang akurat dan terkini, mendukung analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dukungan teknis yang konsisten dan terkoordinasi meningkatkan kapasitas daerah dalam penanganan bencana. Hibah peralatan dan logistik yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan lokal meningkatkan

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			kesiapsiagaan dan respons bencana.
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sistem Informasi Penerimaan dan Penyetoran PAD (SIP3)	Perangkat lunak yang dipergunakan untuk memudahkan stakeholder dalam melakukan pemesanan/transaksi, mempercepat penerimaan dan Penyetoran PAD, efisiensi dalam pengelolaan anggaran, serta transparan dan dapat dipertanggung jawabkan pengelolaan PAD di Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu

BAB VI

PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 memiliki makna yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara selama 1 (satu) tahun anggaran. Penyusunan Ringkasan LPPD TA. 2025 selain untuk melihat pencapaian yang telah dilaksanakan pada program kerja tahun 2025, tetapi juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan efektivitas, efisiensi, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ringkasan RLPPD Provinsi Sumatera Utara TA. 2025 ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah selama 1 tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Penyampaian Ringkasan LPPD ini sebagai perwujudan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Ringkasan LPPD Provinsi Sumatera Utara TA. 2025 menyajikan hasil dari capaian program, permasalahan yang dihadapi serta solusi dari permasalahan tersebut. Berbagai permasalahan yang masih belum dapat dicapai pada tahun 2025 akan menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintah pada

tahun selanjutnya. Masukan dari masyarakat Provinsi Sumatera Utara sangat diharapkan dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan sekaligus juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Kita bersyukur bahwa Provinsi Sumatera Utara mampu mencatatkan Pertumbuhan yang positif terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan neraca perdagangan. Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Optimalisasi anggaran dan program kerja memberikan dampak positif dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2025. Berbagai bidang urusan pemerintahan telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, hal ini terlihat pada urusan pemerintahan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, perumahan rakyat, serta ketenteraman dan ketertiban umum.

Hasil-hasil yang telah dicapai selama ini memperlihatkan adanya komitmen yang kuat dari semua elemen yang menjadi pondasi yang kokoh untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Terhadap kemajuan yang sudah dicapai dimasa lalu patut untuk disyukuri dan akan terus dilanjutkan dimasa-masa yang akan datang, dan kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusi dalam pencapaian terbaik dalam proses pembangunan Sumatera Utara baik.

Kami menyadari bahwa penyusunan Ringkasan LPPD TA. 2025 ini tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan dimaksud dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab serta mampu menjawab perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian Ringkasan LPPD Provinsi Sumatera Utara TA. 2025 ini disampaikan, semoga dapat menjadi bahan untuk memberikan catatan perbaikan atau rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan menjadi sumber informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Semoga Allah S.W.T melindungi dan memberikan kekuatan kepada kita semua.